

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dalam menyikapi pembukaan kantor perwakilan OPM di beberapa negara seperti di Oxford (Inggris), Den Haag (Belanda), Port Moresby (PNG), dan Perth (Australia), Indonesia tidak terlalu mempermasalahakan hal tersebut. Sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hal tersebut bukanlah menjadi ancaman bagi Indonesia. Selain itu, hukum internasional yang ada secara jelas dan tegas menjelaskan status Papua dan Papua Barat yaitu Resolusi No.2504 tanggal 19 November 1969 yang menyatakan bahwa Irian Barat menjadi Irian Jaya (Papua dan Papua Barat) dan menjadi wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia beranggapan aktivitas OPM di luar negeri, yaitu dengan menyuarakan pendapatnya, merupakan salah satu hal dalam nilai demokrasi, dan pemerintah pun tidak dapat melarang hal tersebut. Sedangkan aktivitas OPM di dalam negeri yang bertujuan mengacaukan keamanan dalam negeri Indonesia adalah bentuk gerakan yang masih ingin memisahkan diri dari Indonesia. Dan ini menjadi tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta aparat terakik untuk meredam keinginan tersebut.

Paradigma pembangunan Indonesia yang sentralistik dan terlalu berpusat di Barat, secara penuh belum mampu menyentuh pembangunan di Timur Indonesia, khususnya di Papua dan Papua Barat. Keterbelakangan pembangunan yang terjadi di Papua dan Papua Barat membuat rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Walaupun provinsis tersebut memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, nyatanya belum dimanfaatkan secara tepat. Pendidikan dan kesehatan di dua provinsi ini masih dapat dikatakan berada di bawah rata-rata. Selain itu, aktivitas OPM yang bersifat sporadis masih terus ada dan masih terus berupaya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Untuk meredam keinginan tersebut, di tahun 2001 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dan Perpres No. 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua

Barat (P4B) untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Nyatanya beberapa produk pemerintah tersebut masih dirasa belum sesuai harapan masyarakat Papua. Melalui pemerintah daerah Papua, mengeluarkan 20 poin gagasan Otonomi Khusus Plus. Namun gagasan Otsus Plus tersebut belum menjadi pembahasan dan perhatian dari pemerintah pusat.

Secara umum, OPM melakukan kampanye-kampanye negatif menuntut kemerdekaan dari Indonesia lewat kegiatan demonstrasi, menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara di Pasifik Selatan dan Eropa serta keikutsertaan OPM dalam forum-forum internasional seperti MSG. Kampanye-kampanye yang dilakukan adalah dengan menggunakan media massa dan menjalin hubungan yang baik dengan negara mitranya untuk mempermudah mereka mendapat pengakuan internasional. Dukungan dari LSM-LSM internasional adalah upaya lain yang dilakukan oleh OPM. Walaupun OPM sendiri belum satu dan masih terpecah-pecah, namun diaspora OPM di luar negeri cukup kuat.

Dalam menyikapi upaya-upaya yang dilakukan oleh OPM untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional, kebijakan global yang pemerintah gunakan adalah mengatakan kepada dunia bahwa Papua dalam keadaan baik. Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, memiliki strategi diplomasi yang sama yaitu mengeratkan hubungan dengan negara-negara di Pasifik. Dalam hal ini, Indonesia menggunakan diplomasi *multitrack* yaitu tidak hanya menggunakan peran dari pemerintah saja melainkan masyarakat sipil, aktivis, kelompok profesional, rohaniawan, pembisnis, pelatihan dan pendidikan, media massa dan pendanaan. Selama periode tahun 2013 – 2014, fokus pemerintah lebih ke daerah Pasifik, namun dalam hal kaitannya dengan OPM di Eropa, pemerintah juga melakukan beberapa diplomasi seperti membawa orang asli Papua langsung ke Parlemen Eropa dan melakukan kuliah umum di beberapa universitas disana.

Diplomasi *multitrack* yang digunakan oleh Indonesia sudah cukup efektif. Namun ada beberapa jalur yang masih belum digunakan secara maksimal seperti jalur media massa, pendanaan, dan rohaniawan. Selain itu, beberapa negara di Pasifik Selatan masih banyak yang mendukung agar Papua memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan OPM pun semakin kuat setelah dibentuknya organisasi

payung ULMWP dan menjadi observer dalam forum *Melanesian Spearhead Group* (MSG). Disisi lain, diplomasi Indonesia dapat dikatakan gagal karena OPM masih terus menyuarakan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dan pemerintah masih belum menganggap hal tersebut sebagai hal dengan tingkat urgensi yang tinggi.

V.2 Saran

Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua, sebaiknya :

1. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa memperhatikan kondisi Papua saat ini, sebab banyak kepentingan-kepentingan yang ingin mengeruk kekayaan alam Papua. Selain itu, generasi muda juga harus pandai menggunakan media sosial untuk melawan propaganda-propaganda yang dilakukan oleh OPM.
2. Harus terbangun koordinasi yang baik antar K/L dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua, khususnya dalam menyikapi upaya OPM.
3. Secara akademis, penelitian ini masih harus terus diperbaharui dan ditinjau dari sisi lain penelitian yang lebih membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok OPM.